

**STRATEGI POLISI DAERAH JAWA TIMUR DALAM PENGENDALIAN
UNJUK RASA PERSPEKTIF PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 DAN *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Oleh:

Ayatulloh Imam Romadhoni

NIM. 05040422063



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayatulloh Imam Romadhoni
NIM : 05040422063
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Strategi Polda Jatim dalam pengendalian unjuk rasa berdasarkan perkap nomor 7 tahun 2012 dan *fiqh siyasah*.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Februari 2026



Ayatulloh Imam Romadhoni
Ayatulloh Imam Romadhoni
NIM. 05040422063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ayatulloh Imam Romadoni

NIM : 05040422063

Judul : Strategi Polisi Daerah Jawa Timur Dalam Pengendalian Unjuk
Rasa Perspektif Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Dan *Fiqh*
Siyasah

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 06 Februari 2026

Pembimbing,



Drs Jeje Abdul Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ayatulloh Imam Romadoni
NIM. : 05040422063
Judul : Strategi Polda Jatim Dalam Pengendalian Unjuk Rasa Perspektif
Peraturan Kapolri 7 Tahun 2012 Dan *Fiqh Siyasah*

Telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqosah Skripsi pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. Jeje Abd Rojaq, M.Ag.
NIP.196310151991031003

Penguji III

Achmad Safiudin R., MH.
NIP. 199212292019031005

Penguji II

Dr. Hj. Ans Farida, S.Sos, SH, M.Si.
NIP.197208062014112001

Penguji IV

Nurika Fakh Ilmania, M.H
NIP. 200005032025052009

Surabaya, 28 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayatulloh Imam Romadhoni
NIM : 05040422063
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : dhooniam@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Mei 2026

Penulis


)
Ayatulloh Imam Romadhoni

ABSTRAK

Strategi Kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa menggunakan konsep *Tactical Floor Game* dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 sebagai pedoman bagi Kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa. Terdapat tantangan dan juga hambatan pada saat menangani aksi unjuk rasa, kurangnya profesionalitas Kepolisian sehingga memicu eskalasi massa yang tidak dapat di tertibkan, dan juga kurangnya pemahaman bagi massa aksi terkait isu yang diangkat pada saat demonstrasi dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio-legal dengan data penelitian yang diperoleh dari Bahan hukum primer berupa lampiran foto dan juga hasil wawancara dengan Personel Polda Jawa Timur yakni Satuan Dalmas, terkait bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, serta prinsip hukum tata negara dan *fiqh siyasah*, untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dengan kerangka hukum positif dan prinsip *syariah*.

Hasil wawancara dan lampiran dijadikan dasar sebagai bukti bahwa Polda Jawa Timur sudah melakukan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam aturan terkait. Terdapat ketimpangan antara norma dan pelaksanaan, karena kurangnya pemahaman dari masyarakat sehingga setiap tindakan Kepolisian dianggap sebagai pelanggaran hukum, kurangnya profesionalitas Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perlunya pembaharuan norma karena terkesan jadul sehingga kurang mengatur terhadap hal-hal yang sifatnya spesifik. Terakhir terkait penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian, baik secara etik, disiplin, maupun pidana, tergantung pada perbuatan dan tingkat akibat yang ditimbulkan.

Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu, untuk memberikan pelatihan dan pembinaan lebih mendalam kepada satuan Dalmas terkait isu hukum yang dipermasalahkan dan substansi hukum sebagai pedoman bagi aparat Kepolisian sendiri, sehingga dalam menyelenggarakan dan mengamankan aksi unjuk rasa dapat menciptakan situasi atau kondisi yang kondusif, tertib, dan patuh terhadap aturan hukum. Penggunaan kekuatan kepolisian menyesuaikan dengan tingkat ancaman yang diterima, sehingga mampu menghindari tindakan yang bersifat represif dan berpotensi merugikan massa aksi.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| G. Landasan Teori | 14 |
| H. Definisi Operasional | 16 |
| I. Metode Penelitian..... | 18 |
| BAB II KERANGKA TEORITIS | 23 |
| A. Strategi Kepolisian | 23 |
| B. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. | 24 |
| C. Teori Diskresi | 25 |
| D. Teori Proporsionalitas | 27 |
| E. Teori Hukum Progresif..... | 35 |
| F. <i>Fiqh Siyasah</i> | 40 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB III STRATEGI POLDA JATIM DALAM PENGENDALIAN UNJUK RASA PERSPEKTIF PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PEGAMANAN, DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN DIMUKA UMUM..... | 48 |
| A. Gambaran Umum Polda Jatim | 48 |
| B. Direktorat Samapta | 49 |
| C. Satuan Dalmas | 50 |
| D. Strategi Pengendalian Massa | 52 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | 63 |
| A. Strategi Polisi Daerah Jawa Timur dalam menangani Aksi Unjuk Rasa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012..... | 63 |
| B. Pandangan <i>fiqh siyasah</i> dalam penanganan Aksi Unjuk Rasa | 73 |
| BAB V PENUTUP..... | 80 |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSAKA | 82 |
| LAMPIRAN..... | 92 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSAKA

I. Daftar Pustaka Berupa Buku

Abu'l hasan 'Al ibn Muhammad Ibn Habib al-Basri al-Baqhdadi al-. *Al-Ahkam Al Sultaniyyah*, ed. Darul Falah. Jakarta: 2020

الحسبة

II. Daftar Pustaka Berupa Jurnal, Skripsi, Tesis

Abdullah, Asnawi, dan Safriadi Safriadi. “Otoritas Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan: (Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh).” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (15 Juni 2022): 55–70.

admin. “Strategi Efektif Untuk Meningkatkan Keamanan Polisi.” *Kepolisian Resor Pohuwato*, September 23, 2025. <https://polrespohuwato.com/strategi-efektif-dalam-operasi-kepolisian-untuk-meningkatkan-keamanan/>.

Ahsan, Muhammad Firman. Pengadopsian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 6 (28 Desember 2025): 793.

Ali, Mahrus, dan M. Arif Setiawan. “Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (5 Juni 2021): 245–79.

Alkautsar, Raden Adya Untea, Bagas Dewanto, Damar Winata, Muhammad Ardhika Fardhan Kusnadi, dan Diesta Arya Wicaksono. Pendekatan Hukum Progresif terhadap Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM* 4, no. 1 (25 Juni 2025): hal 18.

Almau Dudy, Aryadi, dan Suheflihusnaini Ashady. Peran Kepolisian Dalam Menertibkan dan Mengamankan Aksi Demonstrasi. *Jurnal Unmas Mataram* 18, No 2 Juni 2024 (9 Juni 2024): 1128–34.

Aminulloh, Muhammad Dziki. Peranan Polri dalam Menangani Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. *Jurnal Dinamika* 27, no. 15 (7 Juli 2021): 2274.

- Anjar Maulana, Basir S, dan Firman Fadillah. "Analysis of Skills and Knowledge of Dalmas Personnel Case Study at Polres Cianjur." *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial* 9, no. 1 (3 Maret 2022): 39–50.
- Aprilia S.H, Rizka Ayu. "Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Untuk Mencegah Terjadinya Kerusakan Ditinjau Hak Asasi Manusia (HAM)." Tesis, Undaris 2024.
- Arnapi, Karnaji, Izzah Khalif Raihan Abidin, dan Rofadan Mina Arsyada. "Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa." *Media Iuris* 7, no. 1 (7 Februari 2024): 31–50.
- Bahri, Samsul. Wilayatul Hisbah: Instrumen Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Islam. *El Faqih: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (20 Agustus 2024): 70.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33.
- Borahima, Rizmala Nadiah. Kinerja Korps Brimob dalam Penanggulangan Aksi Huru Hara dan Unjuk Rasa di Wilayah Kota Palu. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik* 1, no. 1 (1 Juni 2025): 37.
- Buldani, Muhammad Nahidh. "Kajian Hukum Pidana dan HAM Terhadap Tindak Kekerasan Aparat dalam Aksi Unjuk Rasa." *Jurnal Ilmiah Global Education* 6, no. 3 (30 Agustus 2025): 2054–64.
- Camelia, Shinta Dara. Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi Di Tais Kabupaten Seluma). Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatamati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Dachak, Hadi. "The Principle of Proportionality of Crime and Punishment in International Documents." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 4 (4 Mei 2021): 684.
- Dm, Mohd Yusuf. Peran Hukum Progresif dalam Menyelesaikan Konflik Pidana Masyarakat: Tantangan dan Solusi Hukum Berkeadilan. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 11, no 2 (31 Desember 2025): 134 .
- Faiqah, Razita, Hasnul Arifin Melayu, dan Azmil Umur. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pada WH (Wilayatul Hisbah) dalam Pencegahan Pelanggaran di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2 Juni 2025): 651.

- Fajar, Kamizi, dan Marzuki. Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (10 September 2025): 20.
- Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, dan Opik Rozikin. “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (31 Januari 2025): 46–71.
- Febriani, Erna, Dani Vardiansyah, Pratna Paramitha, dan Erwan Baharudin. Negoisasi terpadu sebagai strategi Penanganan Aksi Massa (Studi kasus penanganan Aksi Mahasiswa “Korupsi Reformasi” oleh Lembaga Kepolisian). *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 19, no. 1 (20 Maret 2022): 45 .
- Febriyanti, Cahya Alifia. Penggunaan Kekuatan Polri dihubungkan dengan alasan Penghapusan Pidana Studi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. *Jurnal Lex Positivis* 2, no. 5 (6 Mei 2025): 684-685.
- Fuadi, Fajriatul. Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 1 (3 Januari 2025): 73.
- Greco, Silvana. “Cesare Beccaria and the Lombard Enlightenment in the Sociological Thought of Moses Dobruska.” *Quaderni Di Teoria Sociale (IT)* 2, no. 2 (14 Desember 2023): 22.
- Hajar, Elvira Sitna. “Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah.” *An Nawawi* 1, no. 2 (11 Oktober 2021): 71–78.
- Helda Okta Havifah, Somawijaya Somawijaya, dan Rully Herdita Ramadhani. “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pemidanaan.” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 3 (3 Juni 2024): 392–403.
- Irwadi, Baso. Penegakan Hukum terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Berujung Anarkis di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (17 Agustus 2020): 10.
- Junianto, Ahmad, dan Moch Nurcholis Majid. “Ombudsman dalam perspektif Fiqh Siyasah: Ombudsman In Fiqh Siyasah Pesrpetive.” *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (8 November 2022): 85–96.

- Kharisudanya, Dioba Akdemart Sila. Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Menimbulkan Kerusakan pada Fasilitas Umum. *Journal of Law and Nation* 3, no. 1 (17 Januari 2024): hal 100.
- Kristiono, Hellyn, dan Nynda Fatmawati. “Pemidanaan dan Strategi Kepolisian dalam Mencegah Penyebaran Narkotika.” *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (17 April 2023): 41–50.
- Kurniawan, Andri Surya. “Penggunaan Kekuatan Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009.” *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 12 (20 Desember 2022): 1342–48.
- Lahirsen, Bobby. Brimob di Garis Depan: Perlindungan Hukum dalam Menghadapi Aksi Massa Anarkis di Kota Lubuklinggau. *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 9 (26 Oktober 2025): 340.
- Mohamad Ramadan Habibi, Siti Nurjanah. Implementasi Teori al-Maslahah Najmuddin ath-Thufi dalam Fatwa Politik Yusuf al Qaradhawi. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no.11 (2 Juni 2025): 238.
- Monaghan, Jake. “Policing Disobedient Demonstrations.” *Criminal Law and Philosophy* 17, no. 3 (17 Januari 2023): 653.
- Munajat, Makhrus. Dinamika Penegakan Hukum Jinayat di Aceh: Harmonisasi antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 14, no. 1 (2 Juni 2025): 93.
- Nasution, Latipah. “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi dalam Ruang Publik di Era Digital.” *Adalah* 4, no. 3 (20 Juni 2020):38
- Nur Azzahra, Annisa, Yadi Janwari, dan Fahrul Rizal. “Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (30 Juli 2024): 11284.
- Nurdiansyah, Bambang, Sulastri Caniago, dan Wardatun Nabilah. “Legal Certainty In Expressing Opinions In Public During The Industrial Revolution Era According To Positive Law In Indonesia And Siyasa Dusturiyah.” *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (30 Juni 2024): 70.
- Pardosi, Pardomuan, Wira Anugrah Siregar, Yeni Triana, Alen Siswanto, Erikson H. Candra, dan Wiwid Feryanto. *Filsafat Hukum Kritis atas Peran Hukum dalam Demonstrasi di Indonesia: Emansipasi atau Represi. Indonesian of Journal Business Law* 4, no. 2 (11 Agustus 2025): 78.
- Manuella, Khusi Geby. Penanganan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Berdasarkan Prinsip ICCPR pada Unjuk Rasa Agustus 2025.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 2 (6 Agustus 2025): 1483.

- Prihatin, Lilik, Mohammad Amin, dan Darmawan Darmawan. “Implikasi Asas Proporsionalitas dalam Wanprestasi: Suatu upaya Mewujudkan Keadilan Substantif.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (6 Januari 2023): 186–94.
- Qatrunnada, Aliefia, dan Muannif Ridwan. “Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (30 Mei 2022): 104–12.
- Rahayu, Eka Septalia, Bayti Nur Fitria, Adinda Zanata Zahra, and Oksiana Jatiningih. Tingkat Citizen Trust Terhadap Aparat Kepolisian Pasca Demonstrasi di Surabaya 2025. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (18 Desember 2025): hal 1982.
- Rahman, Arif Rayyan, dan Dyva Claretta. “Polisi Negara Republik Indonesia Dan Kekerasan Di Media (Sebuah Analisis Wacana).” *Syntax Idea* 7, no. 3 (29 Maret 2025): 464.
- Ramadanti, Nabila Annisa, Amanda Putri, Sumeirat Tresna Rahayu, dan Moh Alvi Pratama. Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (20 Juni 2025) hal 6.
- Razak, Abdul, dan Zulkifli Aspan. Peran Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *APHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Desember 2024): hal 4-5.
- Rizki Mulyaningsih, dan Muhammad Arafa. “Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Konstitusional: Tinjauan terhadap Praktik Penanganan Aksi Demonstrasi.” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 1 (15 Desember 2025): 177.
- Rika Damayanti, Gustika Sandra, dan Nurmi Sari, Efektivitas Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (17 September 2023): 71.
- Sadzali, Ahmad. “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (21 Desember 2022): 193–218.
- Safitra, Rafli Dwi. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa. 2024, 39–41.
- Sahputra, Mirza. Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no 1 (25 Agustus 2022): 94.

- Sahrial. Kewenangan Wilayah Al-Hisbah Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dan Penerapannya Di Aceh. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2022, 55.
- Sayuti, Sayuti. “Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi.” *Siyasah Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 2, no. 1 (1 Juni 2024): 51–60.
- Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen Zulkarnen, Agus Rizal, dan Ibnu Satrio. “Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (3 Oktober 2024): 266.
- Setyawan, Vincentius Patria. Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis. *Legal Journal of Law Advice* 2, no. 1 (27 Maret 2025): 50 .
- Shafwan, Rafi Ahmad, Yulianisa Damayanti, dan Zikry Mastalia Lubis. Batasan Kewenangan Kepolisian dan WIlyatul Hisbah di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Qanun Jinayat. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 4, no. 3 (1 Desember 2025): 104-105.
- Sihombing, Jasalmon, and I. Made Kantikha. Handling Anarchist Demonstrations That Are Harmful to the Community Based on Police Standard Operating Procedures in the Jurisdiction of Polda Metro Jaya. *International Journal of Science and Society* 7, no. 1 (2 Februari 2025): 333.
- Sinurat, Alexander. Proporsionalitas Pidanaan oleh Hakim di Indonesia dalam Putusan Pembunuhan. *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2 April 2025): 207.
- Siregar, Mardona. “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (14 Agustus 2024): 10.
- Siswanto, Moh Roiis Edy, dan Irsyadul Aufa. Kedaulatan rakyat dalam pergulatan konsep Islam dan Barat: Analisis pemikiran AL-Mawardi an Jean-Jaques Rousseau. *Jurnal Hukum Islam dan Tata Negara* 1, no. 1 (30 Juni 2025): 38.
- Situmorang, Andre Fernando, Azka Afdhalul Rizqullah, Fraja Mulya, Dwi Bakti, dan Bintang Alfath Richard Hukum. Peran Hukum Progresif dalam mencari Keadilan menurut Satjipto Rahardjo. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (30 Juni 2025): 7.
- Soesanto, M. Hendro, dan M. Syahrul Borman. Penerapan Diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap Massa Demonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (1 November 2023): 447 .

- Sudargo, Ryan, Eddy Asnawi, dan Bagio Kadaryanto. Penerapan Hukum Terhadap Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. *Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 6.
- Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan, dan Muhammad Zamroni. *Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam. Jurnal Studi Islam Indonesia* 3, no. 1 (13 Juni 2025): 172.
- Sukri Badaruddin, Nabila Fani Basri, dan Sri Wahyuni. "Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis." *Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2 Desember 2020): 130.
- Saptaji, Aji. Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (10 Mei 2025): 3074.
- Toha, Hanna Theresia Febiola, Cornelis Djelfie Massie, dan Grace Yurico Bawole. Tanggung Jawab Oknum Kepolisian yang Bertindak Represif dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 2 (13 Januari 2024): hal 8.
- Ubaidillah, Nizam, dan Nurus Syalafiyah. "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (1 Maret 2025): 139.
- Basir Askal, Muhammad. View of strategi kepolisian resort buton utara dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui penerapan community policing." *Journal Publicuho* 8, no 3 (9 Agustus 2025): 1269
- Wibisono, Rio. "Peran Brimob Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Ekswil Pekalongan." Skripsi, Unissula 2024.
- Wijaya, Oscarius Yudhi Ari, dan Hendra Gunawan. The Strategy of Indonesia's National Police Law Enforcement under Public Pressure and Social Media in East Java Province. *Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 11 (23 Juni 2025): 22.
- Yoga, Sang Jaya."Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022.

Yuristyawarman, Muhammad Omega, dan Rizka Maulidaen Rustandi. "Analisis Sosiologi Hukum Dalam Realitas Sosial." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (9 September 2023): 15228.

Yusuf, Ahmad Sadriansyah. Proses Penanganan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung. *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (Desember 2024): 9.

Ziar, Nanda Nugraha. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (7 Juli 2022): 462–75.

III. Daftar Pustaka Berupa Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Unjuk Rasa.

Perkap. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/ 1 / X / 2010 Tentang Penanggulangan Anarki. 2010.

Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

IV. Daftar Pustaka Berupa Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi. Pengujian Materiil Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. July 3, 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 1 Juli 2025.

V. Daftar Pustaka Berupa Data Elektronik

Total 997 Orang Diamankan Polda Jatim dalam Demo Berujung Ricuh. Accessed Desember 9, 2025. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/total-997-orang-diamankan-polda-jatim-dalam-demo-berujung-ricuh/>.

Pradana, Putra. "KontraS Surabaya Ungkap Dugaan Kekerasan Polisi pada Aksi Demo 29–30 Agustus." September 28, 2025. <https://www.ngopibareng.id/read/kontras-surabaya-ungkap-dugaan-kekerasan-polisi-pada-aksi-demo-29-30-agustus>.

Pooc, Admin. "Formasi Pasukan Dalmas Awal Setelah Lapis Ganti Adalah." *Pooc*, <https://www.pooc.org/formasi-pasukan-dalmas-awal-setelah-lapis-ganti-adalah/>. 13 Februari 2026.

NU Online. "Larangan Kekerasan Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif." Accessed Januari 10, 2026. <https://islam.nu.or.id/syariah/larangan-kekerasan-aparat-penegak-hukum-dalam-perspektif-islam-dan-hukum-positif-leNwx>.

Satjipto Rahardjo: Pemikiran Hukum Progresif. Accessed Maret 30, 2026. <https://yurisopinion.blogspot.com/2025/04/satjipto-rahardjo-pemikiran-hukum.html>.

Hadits-Hadits Tentang Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar. Accessed Desember 10, 2025. <https://www.ilmualquran.com/2015/06/hadits-hadits-tentang-perintah-beramar.html>.

www.dandapala.com. "Pemikiran Satjipto Rahardjo: Jejak Sejarah Hukum Progresif di Indonesia." Accessed Januari 19, 2026. <https://dandapala.com/article>.

VI. Daftar Pustaka Berupa Hasil Wawancara

Ayatulloh Imam Romadhoni, Kasubdit Dalmas, Wawancara, Surabaya, 18 Oktober 2025.

Ayatulloh Imam Romadhoni, Bamin Dalmas, *Wawancara*, Surabaya, 28 November 2025.

Ayatulloh Imam Romadhoni, Ps Subagsunluhkum Bidkum Polda Jatim, *Wawancara*, Surabaya, 27 Januari 2026.

Ayatulloh Imam Romadhoni, Ps Subagbankum Bidkum Polda Jatim, *Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2026.

Ayatulloh Imam Romadhoni, Ketua Komunitas Peradilan Semu FSH, *Wawancara*, Surabaya, 20 Agustus 2025.

Ayatulloh Imam Romadhoni, Ketua Senat Mahasiswa FSH, *Wawancara*, Surabaya, 20 Agustus 2025.

Ayatulloh Imam Romadhoni, Ketua Senat Mahasiswa FISIP, *Wawancara*, Surabaya, 22 Agustus 2025.

Ayatulloh Imam Romadhoni, Ketua Senat Mahasiswa FAHUM, *Wawancara*, Surabaya, 25 Agustus 2025.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A